

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PELAKU USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR SERANG)
DI KABUPATEN SERANG**

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Magister Hukum
Strata Dua (S-2) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**



Disusun Oleh :

**NAMA : DADI SURYADI AR
NIM : 7773190014
KELAS : B**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2019**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PELAKU USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK PERKREDITAN
RAKYAT (PD. BPR SERANG) DI KABUPATEN SERANG**

Dadi Suryadi AR

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Jakarta Km. 4, Panancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang,
Banten, 42124

Email :Dadisuryadi@yahoo.com

HP : 081317125664

ABSTRACT

PD. Serang Rural Credit Bank hereinafter referred to as PD. BPR Serang is known as one of the pioneering and pioneering BPRs in the empowerment program of SMEs. Through various innovative banking service products supported by reliable human resources and information technology-based operational systems, BPR Serang is now developing in serving the needs of community banking services in Serang Regency.

This study aims to determine and analyze the role of BPR Serang in an effort to improve business smoothness for SMEs and to find out and analyze what are the obstacles that occur in the implementation of SMEs credit in Serang BPR.

The research method used by the author is normative juridical legal research. From this legal research, it can be concluded that BPR Serang has played a fairly good role because it can overcome the problem of capital shortages of SMEs. However, there are still obstacles in the implementation of lending to SMEs. This is based on several factors, both internal and external of BPR Serang which still need to be evaluated by BPR Serang so as to improve company performance in developing the business of SMEs.

Keywords: *Loan Implementation, SME's, Rural Banks (BPR)*

ABSTRAK

PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang selanjutnya disebut PD. BPR Serang dikenal sebagai salah satu BPR pelopor dan perintis dalam program pemberdayaan pelaku UMKM. Melalui berbagai produk layanan perbankan yang inovatif di dukung dengan SDM yang handal dan sistem operasional berbasis teknologi informasi, BPR Serang kini sedang berkembang dalam melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat di Kabupaten Serang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran BPR Serang dalam upaya meningkatkan kelancaran usaha bagi pelaku UMKM dan Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit UMKM di BPR Serang.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa BPR Serang telah memainkan peran yang cukup baik karena dapat mengatasi persoalan kekurangan modal pelaku UMKM. Namun, masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada pelaku UMKM. Hal tersebut didasari karena beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal BPR Serang yang masih perlu di evaluasi oleh BPR Serang sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Kredit, UMKM, Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*

A. Pendahuluan

Dunia perbankan pada masa era globalisasi sekarang ini semakin berkembang dan masuk dalam dunia bisnis. Dengan bertambah pesatnya industri perbankan membuat persaingan antar bank juga semakin ketat dalam merebut nasabah serta mempertahankan pangsa pasar yang ada. Oleh karena itu dalam persaingan yang demikian, perusahaan dituntut untuk dapat memuaskan pelanggannya dengan memberikan pelayanan yang baik serta menciptakan produk-produk berkualitas sesuai dengan keinginan nasabah.

Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan tujuan pendirian suatu lembaga keuangan yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Dalam perspektif ekonomi dikenal tiga jenis lembaga keuangan di Indonesia yang diakui dan sah menurut hukum yaitu Bank, Pasar Modal, dan Asuransi. Selain itu masih ada lembaga keuangan lainnya, namun lembaga keuangan tersebut lebih bersifat sosial.¹

Perbankan sebagai bagian dari industri jasa yang dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas, terutama kualitas pelayanan terhadap nasabah. Bank juga dituntut untuk menciptakan nilai tambah yang baik dari para pesaing,

¹Y. Sri susilo, dkk, *Bank dan lembaga keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 18

dengan cara tersebut pihak bank dapat menarik nasabah baru dan dapat mempertahankan nasabah lama. Oleh karena itu mutu pelayanan bank kepada nasabah semakin menduduki perannya yang strategis. Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan adalah kredit, yang mana berfungsi untuk menambah nasabah dan menjaga serta mempertahankan nasabah lama.²

Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, hal tersebut menimbulkan terjadinya perputaran uang dimasyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :³

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
3. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya;
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam kegiatan perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan yang menggerakkan roda perekonomian, dapat menjalankan usahanya dengan baik apabila ia menyalurkan kreditnya dengan lancar. Dengan Adanya kredit maka bank berhak atas prestasi nasabah peminjam agar tidak semata-mata melunasi

² Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 1

³ Eric Compton, *Dasar-Dasar Perbankan, Diterjemahkan oleh Alexander Ocy*, Akademi Presindo, Jakarta, 1998, hlm.7

utangnya tetapi juga disertai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Salah satu bentuk perekonomian Indonesia adalah usaha kecil, seperti petani, pedagang dan lain-lain yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi. Dengan adanya lembaga ini, mereka bias membuka usaha disamping itu pihak bank juga memberikan kredit dengan bunga yang rendah. Karena konsumen terbesarnya adalah petani dan pedagang yang pada umumnya berada dalam kategori kecil, maka lembaga bank memberikan transaksi ini kredit pengusaha kecil, agar mudah didalam proses pemberian kredit.⁵

UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat.UMKM ini juga sangat membantu Negara/Pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.Selain itu, UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.⁶

Pelaku Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berharap pemerintah dapat lebih mendukung industry, Pasalnya industry BPR memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan segmen usaha mikro, kecil dan

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 56

⁵ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Bulak Sumar, Jakarta, 1991, hlm.15

⁶http://www.usaha-kecil.com/usaha_kecil_menengahdiakses 20 Oktober 2019 Pukul 11.00 wib

menengah (UMKM) di Indonesia. Menurut Komisaris Utama BPR Bina Dana Cakrawala (BD), Dobias Iskandar, BPR sudah lama berperan dalam memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Peran BPR pun tidak hanya sebatas itu, karena BPR juga turut meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.⁷

Menurut Ali Nuridin, UMKM memiliki peran yang sangat berarti, antara lain :⁸

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi;
2. Memperbesar aset usaha;
3. Meningkatkan kesempatan kerja lebih banyak bagi pekerja local, dan
4. Menciptakan kesempatan bisnis baru bagi komunitas local secara keseluruhan.

PD. BPR Serang memberikan layanan kredit yang merupakan salah satu program dalam mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Akan tetapi, layanan tersebut mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, sebelum memberikan kredit PD. BPR Serang harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.

Berkaitan dengan deskripsi permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran PD. BPR Serang dalam upaya meningkatkan kelancaran usaha bagi pelaku UMKM dan untuk mengetahui serta menganalisis apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit UMKM di PD. BPR Serang.

⁷ <http://infobanknews.com/bpr-tingkatkan-akses-pembiayaan-umkm/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 Pukul 10.30

⁸ Ali Nuridin, *Membangun Bank UMKM : Concepts And Better Practices*, Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Jakarta, 2007, hlm. 9

B. Peran BPR Serang Dalam Upaya Meningkatkan Kelancaran Usaha Bagi Pelaku UMKM

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, maupun masyarakat. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.⁹

Bank tidak dipungkiri telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu peran besar dari bank bagi masyarakat adalah penyaluran dana kredit yang mendorong usaha menjadi lebih maju. Bank telah lama terlibat dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Sektor UMKM di Indonesia memiliki karakter positif seperti menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin, dan dominan dalam struktur ekonomi. Pada praktiknya banyak bank berlomba-lomba memberikan kredit pada UMKM. Adanya penyaluran kredit bank, bank juga membantu mengembangkan pasar UMKM, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

⁹ Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 68

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan formal yang ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat ekonomi lemah khususnya UMKM. BPR berperan mempertahankan dan menopang aktivitas UMKM melalui bantuan permodalan.

BPR sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan bank umum, namun terdapat batasan yang membedakannya dengan bank umum. Siamat menyatakan bahwa BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan BPR tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi utama BPR adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana ke masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum dapat terjangkau oleh bank umum, sehingga menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan serta menghindari jeratan rentenir. Sunarto menyatakan bahwa BPR memiliki spesialisasi pada retail banking dan kredit berukuran kecil yang sebagian besar ditujukan untuk kelas komunitas dan bisnis ke bawah sehingga dapat digolongkan sebagai institusi keuangan mikro.¹⁰

BPR sebagai lembaga keuangan sebenarnya memiliki beberapa keunggulan tersendiri. Abdullah mencatat bahwa keunggulan BPR pertama

¹⁰ Siamat .D. *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 58

adalah cakupan usahanya yang lebih sempit memungkinkan BPR mengenali usahanya dengan lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menekan credit risk, kedua dengan kegiatan yang terbatas dapat lebih fokus dengan kegiatan yang lebih sempit dan membangun suatu keahlian atau expertise pada bidang usaha tertentu dan terakhir dengan bentuk yang lebih kecil juga memiliki kesempatan untuk menjadi efisien, sehingga memungkinkan lebih unggul dalam segmen pemberian kredit kecil atau kredit pada UMKM. Dalam hal ini keterbatasan BPR justru dapat dipandang sebagai kekuatan BPR dalam menghadapi persaingan dengan bank umum.¹¹

Selain itu, perlu pula dilakukan pengembangan produk dan peningkatan hubungan dengan masyarakat. Selama ini perlu digaris bawahi bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan BPR dan hanya tahu tentang Bank Umum. Ketidaktahuan ini membuat mereka ragu dan takut untuk menyimpan uang ataupun menggunakan fasilitas kredit dari BPR. Mereka tidak paham apa perbedaan BPR dengan bank umum padahal mungkin saja mereka justru cocok dan membutuhkan jasa BPR ini. Masih tersembunyinya. Oleh karena itu langkah beberapa BPR yang mulai membuat program mendekati diri dengan masyarakat dan memberikan informasi serta edukasi perlu untuk dilaksanakan dan diikuti oleh berbagai BPR Lainnya.

Edukasi yang dilakukan BPR selain sebagai langkah pemasaran juga dapat membantu masyarakat mendapatkan pendidikan bagaimana mengatur keuangannya. Nasution ,A. menyatakan bahwa bank harus mempromosikan kelebihan-kelebihan mereka, fungsi dan tujuan mereka kepada masyarakat dalam rangka mengubah kebiasaan dalam menyimpan uang dari publik secara umum dan memobilisasi simpanan ini melalui bank.

¹¹ Abdullah B, *Menanti Kemakmuran Negeri : Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006, hlm. 190.

Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, yaitu berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pengertian dari UMKM itu dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 milyar.

Peran BPR Serang dalam upaya meningkatkan kelancaran usaha bagi pelaku UMKM yaitu sebagai berikut :

1. Peran Langsung

Yang termasuk dalam peran secara langsung yaitu BPR Serang sebagai sumber modal bagi pelaku UMKM, BPR Serang memiliki modal yang kuat, adanya pemberdayaan dan perlindungan nasabah, serta peningkatan efektifitas pengawasan.

2. Peran Tidak Langsung

Yang termasuk dalam peran secara tidak langsung yaitu adanya kemudahan akses dan prosedur pemberian kredit yang tidak berbelit-belit, suku bunga yang bersaing, sistem pembayaran yang fleksibel, informasi pemberian kredit mudah di dapat oleh pelaku UMKM, fokus pada pemberian kredit bagi pelaku UMKM dan masyarakat pedesaan, serta mendayagunakan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah.

C. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit UMKM Di BPR Serang Di Kabupaten Serang

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut atau intensitasnya bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara pedesaan dan perkotaan, atau antara sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian , ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya,

keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentu arahnya.¹²

BPR memiliki fungsi yang semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya peran UMKM yang merupakan lahan BPR dan juga komitmen pemerintah yang semakin berkembang untuk mengembangkan UMKM ini. Namun hal ini membuat sektor UMKM ini mulai menjadi incaran dari bank lain seperti bank umum yang tentunya juga berupaya mengembangkan usahanya. Sektor lembaga keuangan non bank pun dikabarkan juga tertarik membidik sektor mikro ini. Sampai saat ini memang BPR masih memiliki keunggulan karena penyebarannya yang menjangkau pelosok tanah air, namun seiring kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi membuat bank umum mampu melebarkan sayapnya ke berbagai daerah yang pada masa lampau belum tersentuh oleh mereka. Hal ini tentu semakin menyudutkan BPR yang kalah dalam permodalan, teknologi, SDM dan dalam kemampuan manajerial atau pengelolaan.

Selama ini sering dijelaskan bahwa salah satu kekuatan BPR adalah pengalamannya pada bisnis mikro ini dan kedekatannya dengan pelanggan. Mengenai hal ini Sunarto berpendapat bahwa durasi dari sebuah hubungan memang dapat menciptakan nilai tersendiri bagi pelanggan dan dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang dapat mengurangi keinginan untuk meninggalkan hubungan tersebut. Namun kompetisi dapat mengancam hubungan ini, dimana bank lain dapat memancing nasabah

¹²Tulus Tambunan, *Op Cit*, hlm. 51

untuk keluar dengan memancing dengan tawaran-tawaran yang lebih menguntungkan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi sektor UMKM adalah :¹³

1. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperluas pangsa pasar.
4. Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.
5. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan.
6. Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku yang berakibat pada harga bahan baku itu sendiri.
7. Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya pelaku UMKM dibandingkan dengan mitra usaha besar.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit UMKM di BPR Serang di Kabupaten Serang yaitu :

1. Syarat Administratif

Yang termasuk dalam hambatan syarat administrative yaitu syarat administratif kurang, nasabah tua atau sakit, jaminan di luar kota dan kekeliruan identitas nasabah.

¹³ Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 10

2. Kebijakan BPR Serang di Kabupaten Serang

Yang termasuk dalam hambatan kebijakan BPR Serang di Kabupaten Serang yaitu terdapat batasan dalam jaminan, batasan kredit kepada pelaku UMKM dan pelaku UMKM belum memiliki izin usaha.

3. Wanprestasi

Yang termasuk dalam wanprestasi yaitu kredit macet, nasabah tidak mematuhi isi perjanjian kredit dan lain-lain.

4. Perbuatan melawan Hukum

Yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yaitu identitas nasabah palsu dan duplikasi syarat administrative

D. Kesimpulan

1. Peran PD. BPR Serang dalam upaya meningkatkan kelancaran usaha bagi pelaku UMKM yaitu sebagai berikut :

a. Peran langsung

Yang termasuk dalam peran secara langsung yaitu PD. BPR Serang sebagai sumber modal bagi pelaku UMKM, PD. BPR Serang memiliki modal yang kuat, adanya pemberdayaan dan perlindungan nasabah, serta peningkatan efektifitas pengawasan.

b. Peran Tidak Langsung

Yang termasuk dalam peran secara tidak langsung yaitu adanya kemudahan akses dan prosedur pemberian kredit yang tidak berbelit-belit, sistem pembayaran fleksibel, informasi pemberian kredit mudah didapat oleh pelaku UMKM, Fokus pada pemberian kredit bagi pelaku UMKM dan masyarakat pedesaan, serta mendayagunakan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit UMKM di PD. BPR Serang yaitu :

a. Syarat Administratif

Yang termasuk dalam hambatan syarat administratif yaitu syarat administratif kurang, nasabah tua atau sakit, jaminan di luar kota dan kekeliruan identitas nasabah.

b. Kebijakan PD. BPR Serang

Yang termasuk dalam hambatan kebijakan PD. BPR Serang yaitu perjanjian kredit tidak dapat di addendum, terdapat batasan dalam jaminan, batasan kredit kepada pelaku UMKM dan pelaku UMKM belum memiliki izin usaha.

c. Wanprestasi

Yang termasuk dalam wanprestasi yaitu kredit macet, nasabah tidak mematuhi isi perjanjian kredit dan nasabah menyediakan asuransi sendiri.

d. Perbuatan Melawan Hukum

Yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yaitu identitas nasabah palsu dan duplikasi syarat administratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah B, *Menanti Kemakmuran Negeri : Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006

Ali Nurdin, *Membangun Bank UMKM : Concepts And Better Practices*, Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Jakarta, 2007,

Eric Compton, *Dasar-Dasar Perbankan*, Diterjemahkan oleh Alexander Ocy, Akademi Presindo, Jakarta, 1998

- Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Bulak Sumar, Jakarta, 1991
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, Gramedia, Jakarta, 2001
- Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, BPF, Yogyakarta, 2002
- Siamat .D. ,*Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Y.Sri susilo, dkk, *Bank dan lembaga keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000

B. Internet

http://www.usaha-kecil.com/usaha_kecil_menengah

<http://infobanknews.com/bpr-tingkatkan-akses-pembiayaan-umkm/>